

PERAN MEDIA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL

Nandang HMZ
Universitas Islam Bandung
Jl. Tamansari No. 1 Bandung
ninianteh58@gmail.com

ABSTRAK

Perubahan sosial menuntut penyesuaian dalam berbagai hal, termasuk dalam memahami konflik. Konflik sebagai fenomena titik singgung antara berbagai kepentingan. Pemberitaan di media massa pada dasarnya adalah cerminan realitas. Dalam konteks Indonesia, masih dapat ditemukan banyak pemberitaan tentang konflik baik konflik horizontal maupun konflik politis. Memasuki fase reformasi menandai bahwa sistem politik maupun sistem pers di Indonesia ada pada era yang lebih terbuka. Tapi di lain pihak era keterbukaan seperti ini tidak menjadikan sistem politik dan sistem pers yang lebih demokratis pula. Media massa yang mengangkat pemberitaan tentang konflik dan kekerasan yang pada masa Orde Baru tidak banyak nampak di permukaan justru menjadi hal yang sangat lumrah terjadi pada era reformasi saat ini. Media massa dapat berperan dalam menjembatani suara-suara masyarakat yang selama ini diabaikan oleh para elit politik. Jika komunikasi tersebut dapat diciptakan dengan kontribusi dari media massa, maka harapan terbentuknya tatanan politik yang demokratis lebih dapat diharapkan.

Kata kunci: Media, Konflik Sosial, Penyelesaian Konflik.

1. Pendahuluan

Konflik merupakan ekspresi pertikaian antara individu dengan individu lain, kelompok dengan kelompok lain yang terjadi karena beberapa alasan, antara lain adanya perbedaan antara dua atau lebih individu yang diekspresikan, diingat, dan dialami.¹ Misalnya, konflik antaretnis yang terjadi di beberapa daerah. Media massa bisa dijadikan alat kontrol sosial, yang turut memberikan informasi kepada masyarakat, sebaliknya masyarakat akan melakukan pengawasan terhadap informasi baik dari surat kabar ataupun televisi. Pada tataran ini seorang jurnalis (wartawan) dituntut agar dapat memberikan informasi yang cepat, akurat, sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Sehingga seorang wartawan mampu bersikap obyektif dalam menjalankan tugasnya. Idealisme seorang jurnalis menjadi taruhan ketika ia harus 'berperang' melawan nuraninya sendiri antara tuntutan profesi dan kepentingan bisnis, sehingga layak jual dan berpengaruh terhadap reputasi institusi media. Media

yang profesional merupakan komponen penting bagi kestabilan negara demokrasi, karena merupakan "kekuatan keempat" (*fourth estate*), "pelindung demokrasi, pembela kepentingan umum, menyingkapkan penyelewengan wewenang pemerintah dan membela hak-hak demokratis warga negara".²

Berdasarkan pengamatan dari berbagai peristiwa konflik yang terjadi di Indonesia, peran media banyak dikaburkan oleh institusi media itu sendiri dalam meliput dan menyampaikan beritanya. Sebut saja konflik antara umat Islam dan Kristen yang terjadi di Ambon, berita mengenai konflik agama tersebut cukup banyak dimuat di media massa. Tiap media mempunyai frame (angel) yang berbeda mengenai peristiwa ini. Contoh jelas nampak pada Kompas dan Republika yang dengan ideologi masing-masing menjadi tidak netral lagi dalam meliput peristiwa tersebut dan secara implisit malahan berpihak pada salah satu kubu yang terlibat konflik.³

Media massa memiliki dua pilihan ketika memuat berita, yaitu memenuhi tujuan politik keredaksian media itu sendiri atau memenuhi kebutuhan khalayak pembacanya. Media massa yang mementingkan tercapainya tujuan ekonomis akan memilih berita yang bernilai jual tinggi. Namun media massa yang ingin informasinya bermanfaat bagi pembaca atau pemirsa akan memuat berita-berita yang berguna bagi khalayak. Ada pula media massa yang menganggap informasi hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan ideologis. Informasi disampaikan untuk mempengaruhi dan membujuk khalayak agar berbuat dan bersikap sesuai dengan tujuan ideologis media massa tersebut.⁴ Jika dilihat dari perspektif positivistik, media massa memberitakan pelbagai peristiwa konflik sebagai kegiatan yang bersifat bebas nilai. Media hanya bekerja sebagai pelapor bahwa dalam kenyataan riil di dalam masyarakat marak terjadinya peristiwa konflik.

Dalam sebuah negara yang tingkat kedewasaan politiknya masih rendah, perbedaan kepentingan dan artikulasi politik menjadi rawan konflik. Masyarakat belum terbiasa menghargai perbedaan dan keberagaman pandangan politik dan sebaliknya tingkat toleransi masih sangat rendah yang sesekali memicu berbagai konflik di masyarakat. Namun kebanyakan peristiwa konflik menjadi suatu hal yang layak berita, seperti konflik fisik memiliki nilai berita karena biasanya ada kerugian dan korban⁵. Selain konflik fisik, debat-debat yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat pun mendapatkan tempat yang penting dalam pemberitaan.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, dengan metode komparatif kausalitas. Teknik yang

¹ Faules, F, dan Pace, W. (1994). *Organizational Communication*. Allyn and Bacon, hlm. 28

² <http://trulyoktopurba.wordpress.com/2013/02/05/peran-media-dalam-pengelolaan-konflik-dan-pembangunan-perdamaian-dari-konflik-menuju-perdamaian-4-habis/>

³ <http://outweigh.blogspot.com/2011/01/ketika-media-massa-berperan-dalam.html>

⁴ Siregar, A. (2006). *Etika Komunikasi*. Yogyakarta: Pustaka, hlm :19.

⁵ Ishwara, L. (2007). *Catatan-Catatan Jurnalisme*. Jakarta: Kompas, hlm. 128.

digunakan adalah mengkaji kepustakaan dan mengamati peristiwa-peristiwa yang diliput di media masa kemudian dilakukan interpretasi. Karena dalam perspektif konflik, fakta adalah interaksi dua pihak yang berbeda kepentingan dalam ruang sosial yang hanya menyajikan dua pihak yang bertentangan dan saling berhadapan. Dinamika konflik seperti ini pada dasarnya dapat dilihat sebagai upaya satu pihak mengalahkan pihak lainnya (Siregar, 2006).

Permasalahannya bahwa, profesionalitas media massa harus netral. Apakah pemberitaan konflik dalam ruang media merupakan cerminan realitas kehidupan masyarakat Indonesia?

2. Hasil dan Pembahasan

a. Pengaruh Media Massa Pada Masyarakat

Keberadaan media pers pada umumnya berfungsi sebagai kontrol sosial, menjadi sarana penekan terhadap kebijakan yang diduga tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam konteks sosiologis, pers dapat dipandang sebagai satu sistem bagian dari sistem komunikasi, dan sistem komunikasi bagian dari sistem kemasyarakatan (Samsul Wahidin, 2011: 35). (2011: 42). Menurut Teori Instinctive S-R yang dikemukakan Melvin DeFleur, media menyajikan stimuli perkasa yang secara seragam diperhatikan oleh massa. Stimuli ini membangkitkan desakan, emosi, atau proses lain yang hampir tidak terkontrol oleh individu. Setiap anggota massa memberikan respons yang sama pada stimuli yang datang dari media massa (Jalaluddin, 2007: 197). Dalam teori Agenda Setting dari Maxwell E. McComb dan Donald L. Shaw, media massa memang tidak dapat mempengaruhi orang untuk mengubah sikap, tapi media massa cukup berpengaruh terhadap apa yang dipikirkan orang. Media massa mempengaruhi persepsi khalayak tentang apa yang dianggap penting. Media massa memilih informasi yang dikehendaki dan berdasarkan informasi yang diterima tersebut, khalayak membentuk persepsinya terhadap suatu peristiwa (Jalaluddin, 2007: 199-200). Pada tahun 1940-1960an, D. McQuail menyimpulkan bahwa efek media massa berbeda-beda tergantung pada penilaian terhadap sumber komunikasi; makin sempurna monopoli komunikasi massa, makin besar kemungkinan perubahan pendapat dapat ditimbulkan ke arah yang dikehendaki; sejauh mana suatu persoalan dianggap penting oleh khalayak akan mempengaruhi pada kemungkinan pengaruh media (Jalaluddin, 2007: 198-199).

Pada bagian lain Elisabeth Noelle-Neumann (dalam Jalaluddin, 2007: 200-201), menyebut bahwa media massa mampu mendominasi lingkungan dan berada dimana-mana. Sifatnya serba ada (*ubiquity*) membuat orang sulit menghindari pesan media massa. Perulangan pesan yang berkali-kali dapat memperkuat dampak media massa. Hal ini diperkuat dengan keseragaman para wartawan (*consonance of journalists*) yang menghasilkan

berita yang cenderung sama. Khalayak akhirnya tidak memiliki alternatif lain sehingga mereka membentuk persepsinya berdasarkan informasi yang diterimanya dari media massa. Malcolm⁶ melihat media lebih jauh lagi bahwa media mempunyai kekuatan untuk membuat “yang benar menjadi salah, dan yang salah menjadi benar.” Media sebagai kekuatan strategis dalam menyebarkan informasi merupakan salah satu otoritas sosial yang berpengaruh dalam membentuk sikap dan norma sosial suatu masyarakat. Media massa bisa menyuguhkan teladan budaya yang bijak untuk mengubah perilaku masyarakat. Oleh karena itu, pola hubungan yang harus dijadikan pegangan oleh masyarakat yaitu pers yang bebas dan bertanggungjawab (*free and responsible press*).

b. Media dan Berita Konflik di Indonesia

Demokrasi selama ini dipahami memiliki hubungan dengan perdamaian. Memiliki peran dalam mereduksi atau sebagai resolusi konflik, Ashutosh Varshley (dalam Sugeng, 2010). Dalam perspektif yang berbeda, demokrasi cenderung dapat memicu persaingan etnis yang berpotensi konflik/kekerasan (*conflict-prone*). Jack Snyder (2000) menyebutkan bahwa para elit politik cenderung menggunakan sentimen etnik-religius dan kampanye-kampanye politik sektarian. Akibatnya beberapa negara demokratis baru sangat rentan terhadap konflik kekerasan. Daniel Bell (2004) menyebutkan, demokrasi tidak dapat mencegah konflik/kekerasan dalam masyarakat plural. Karena demokrasi membutuhkan adanya kepercayaan dan pengertian.

Ketika Indonesia mengklaim sebagai negara demokratis, maka konsekuensinya adalah sejauh mana klaim tersebut sejalan dengan kondisi Indonesia dapat menghindari konflik/kekerasan. Padahal pelaksanaan sistem politik yang demokratis tidak serta-merta menjamin terbebasnya dari problematika konflik, mengingat Indonesia negara yang plural. Peran media massa dalam menyoroti peristiwa-peristiwa konflik/kekerasan menjadi penting, sehingga diketahui oleh khalayak secara luas. Selama rezim Orde Baru selalu ditutup-tutupi oleh mekanisme kontrol dan sensor negara. Padahal jika mau jujur fenomena konflik dapat dengan mudah ditemui dalam berbagai pemberitaan di media massa. Eriyanto (2005) misalnya, melakukan penelitian tentang bagaimana konflik di Ambon, Maluku diliput dalam pemberitaan. Konflik yang terjadi di Maluku sebuah fenomena yang mencerminkan pluralisme masyarakat Indonesia, yang menyimpan potensi konflik horizontal. Diperparah lagi dengan politisasi isu SARA. Konflik Maluku diperkirakan lebih dari 10 ribu jiwa melayang, puluhan ribu rumah dan tempat ibadah hancur. Kata Eriyanto, konflik di Maluku ternyata tidak berdiri sendiri, media disinyalir ikut mengambil bagian di dalamnya. Akhirnya yang terjadi bukan hanya konflik antar masyarakat, tapi juga persaingan

⁶ Dalam Rangga, 2010, <http://lk2fhui.org>, 14 Maret 2012.

antarmedia yang berbasis sentimen agama, bahkan memanfaatkan juga oleh kelompok media besar di Indonesia. Demikian juga konflik lainnya, seperti tawuran antar warga dan antar kampung yang muncul dalam kolom berita hampir tiap minggu.

Bentuk konflik terkait dengan kepentingan politik juga hadir dalam pemberitaan media massa di Indonesia secara signifikan, seperti dalam pemilihan umum atau pilkada. Desentralisasi politik yang tercermin dalam bentuk pemilihan kepala daerah secara langsung ternyata berimbas kepada desentralisasi konflik dari pusat bergeser ke daerah-daerah. Sebagai bukti pemberitaan Kompas, lebih banyak berita konflik yang masuk ke dalam rubrik nasional atau nusantara, baik di pusat pemerintahan maupun di daerah-daerah.

Pemberitaan konflik dipandang cerminan masyarakat Indonesia yang tidak mampu memanfaatkan saluran komunikasi politik yang ada. Hal ini mengindikasikan semakin menurunnya tingkat partisipasi publik terhadap sistem politik, dan buruknya demokrasi yang ada di Indonesia. Masyarakat tidak dapat menyampaikan aspirasi politiknya melalui medium komunikasi, mungkin karena aksesnya tidak dibuka atau karena saluran yang ada tidak lagi efektif. Konsekuensinya, konflik dan kekerasan digunakan sebagai saluran alternatif bagi masyarakat untuk mengekspresikan kepentingan politik mereka. Lalu, bagaimana posisi media massa dalam pemberitaan konflik dan demokratisasi sistem politik dilihat dari sejumlah perspektif teori komunikasi massa.

Dalam konteks pemberitaan konflik media massa dipandang memiliki peranan agenda-setting tertentu dalam melihat fakta konflik di lapangan. Dengan mengangkat fakta dari realitas di masyarakat, media berperan dalam mengangkat peristiwa konflik menjadi perhatian publik secara luas. Konflik menjadi diskursus publik karena diangkat oleh media massa dalam berbagai pemberitaannya. McCombs dan Shaw (1972) percaya bahwa fungsi agenda-setting media massa bertanggung jawab terhadap semua yang dianggap penting oleh publik. Karena yang dianggap prioritas oleh media menjadi prioritas juga bagi masyarakat. Berita tidak bisa memilih dirinya sendiri untuk menjadi berita, keterlibatan "gatekeeper" (pemimpin redaksi, redaktur, editor, hingga jurnalis) sangat menentukan.⁷

Pasca 1990an, banyak penelitian dengan teori agenda-setting yang menegaskan kekuatan media massa dalam mempengaruhi khalayaknya yang mampu membuat isu menjadi lebih penting. media massa dipercaya mampu mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir.⁸Media selain memiliki kemampuan menentukan

suatu isu konflik menjadi penting, media juga berperan bagaimana seharusnya masyarakat memaknai fenomena konflik/kekerasan tersebut. Idealnya media melakukan agenda-setting, agar masyarakat menjadi cerdas dalam mengkritisi konflik yang terpublikasikan. Untuk itu, kondisi yang lebih demokratis dapat diharapkan ketika masyarakat lebih kritis dalam mengevaluasi maraknya konflik dan kekerasan di masyarakat.

Realitas media memberitakan konflik bukanlah persoalan sederhana. Efek pemberitaan konflik melalui media massa memiliki dua sisi ambivalen: mempertajam atau sebaliknya, mereduksi konflik. Setidaknya ada tiga posisi media dalam memberitakan konflik.

Pertama, media sebagai *issue intensifier*: memunculkan konflik kemudian mempertajamnya. Dalam posisi ini, media mem-*blow up* realitas menjadi isu sehingga seluruh dimensi konflik menjadi transparan. *Kedua*, media sebagai *conflict diminisher*, yakni menenggelamkan suatu isu atau konflik, terutama bila menyangkut kepentingan media bersangkutan. *Ketiga*, media berfungsi sebagai pengarah konflik (*conflict resolution*), yakni menjadi mediator dengan menampilkan isu dari berbagai perspektif serta mengarahkan pihak yang bertikai pada penyelesaian konflik. Pihak yang terlibat diharapkan memahami sudut pandang pihak lain, mengatasi prasangka dan kecurigaan, serta mengevaluasi ulang sikap apriori yang terbentuk.⁹

c. Media Massa dan Demokratisasi di Indonesia

Media massa selama ini dimaknai sebagai salah satu pilar demokrasi. Artinya, media memiliki peranan yang penting di dalam menjaga bahkan mempengaruhi jalannya suatu sistem politik yang demokratis di suatu negara atau wilayah tertentu. Di negara-negara maju dan dianggap lebih matang dalam pelaksanaan sistem politiknya, posisi media sebagai instrumen demokrasi terlihat eksis menjadi indikator dalam sistem politik. Kemudian memposisikan diri sebagai penyeimbang dalam sistem tersebut untuk menjaga demokratisasi. Dengan menaruh diri sebagai pendorong demokratisasi tatanan politik maka media mirip sebagai advokat. Media diharapkan mampu mengemansipasi kesadaran masyarakat dan tatanan sosial, berperan sebagai instrumen kebebasan berekspresi dan berpendapat. Agar fungsi-fungsi kontrol negara terhadap kebebasan bersuara bagi masyarakatnya menjadi berkurang dan menjauhi segala bentuk represi. Segala bentuk sensor terutama dalam hal komunikasi politik idealnya menjadi semakin menghilang. Menurut Marijan

⁷ Dalam Siti Aminah, Politik Media, *Demokrasi dan Media Politik*, <http://journal.unair.ac.id>, tanggal akses: 14 Maret 2012

⁸ Dian Eka Rahmawati. Diktat Komunikasi Politik dalam Hubungan Antara Media massa, Politik, dan Demokrasi: <http://muslimpoliticians.blogspot.com/2012/02/hubungan->

<antara-media-massa-politik-dan-demokrasi.html>, diunduh: 14 Maret 2014

⁹ Iwan Awaluddin Yusuf dalam <http://bincangmedia.wordpress.com/2010/08/23/dalam-kecamuk-konflik-bagaimana-seharusnya-media-berpihak/>

(2010:189) keberadaan media massa tidak akan dapat melepaskan diri dari corak sistem politik yang melingkupinya. Sistem politik yang demokratis tentunya memungkinkan praktek media yang lebih bebas. Di lain pihak jika sistem politiknya dikatakan belum demokratis maka kita akan menemukan praktek-praktek sensor terhadap media. Atau bahkan dalam tahapan yang ekstrem, media hanya digunakan sebagai alat propaganda penguasa atau pemerintah.

Dalam kasus Indonesia perbedaan ini sangat signifikan. Jika dalam fase pemerintahan Orde Baru di bawah rezim Soeharto yang otoriter media massa sama sekali tidak mencerminkan demokrasi, karena kontrol yang ketat dari pemerintah terhadap praktek media massa, baik terhadap isi dan jumlah media massa yang diijinkan untuk mempublikasikan. Situasi berubah drastis ketika sistem politik di Indonesia seiring dengan jatuhnya pemerintahan Orde Baru. Pergantian sistem politik yang cenderung otoriter menjadi lebih bebas dengan sistem pers yang bebas. Pemberitaan di media massa mulai menemukan kebebasan dalam menyampaikan fakta. Pembredelan dan pencabutan izin terbit bagi media massa ditiadakan. Suranto, Setiawan, dan Ginanjar (1999:136) menggambarkan bagaimana runtuhnya pemerintahan Soeharto berdampak bagi bebasnya media massa di Indonesia dari kontrol negara. Menurut mereka jika sebelumnya sebagian besar SIUPP dimiliki oleh kalangan tertentu yang dekat dengan kekuasaan politik, kini pelawak, pemusik, agen koran, partai-partai dan kalangan masyarakat lainnya ramai-ramai mendirikan media massa. Keemudian diterbitkan lebih dari 852 SIUPP. Data hingga tahun 2008 sudah ada 380 majalah, 692 tabloid, 323 surat kabar, dan 3 buletin yang mendapatkan izin penerbitan (Putra, 2008; Marijan, 2010).

Di era reformasi media massa lebih dianggap mampu merefleksikan dinamika politik di Indonesia. Media massa mampu menyebarluaskan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat tanpa ada sensor sebagaimana yang terjadi pada era Orde Baru. Berbagai peristiwa politik tidak lagi dikontrol dan dikendalikan oleh sekelompok elit. Penyebarluasan informasi tentang peristiwa politik menjadi semakin leluasa. Masyarakat memiliki kemudahan untuk mendapatkan akses terhadap peristiwa-peristiwa penting (Marijan, 2010:98). Peran politik media massa di negara demokratis setidaknya dapat dilihat dari dua peristiwa. *Pertama*, terlihat pada proses seleksi kepemimpinan politik. Di dalam pemilu, media massa dapat mempublikasikan berbagai isu, termasuk visi dan misi yang ditawarkan oleh para calon atau partai, berperan memberikan kritik terhadap mereka. *Kedua*, pascapemilu. Media massa memantau jalannya kehidupan politik sehari-hari, baik kinerja pemerintah, perilaku elit politik, hingga yang terjadi di masyarakat yang terkait dengan sistem politik. (Marijan, 2010:211).

Dalam relasi antara media massa dan demokrasi, menurut Marijan (2010:86) dapat terlihat dari dua bentuk saluran politik. *Pertama*, media sebagai

saluran komunikasi antara para elit, baik yang berada di posisi tertentu dalam pemerintahan (*governing elite*) ataupun elit di luar pemerintahan (*non-governing elite*), atau konstituennya. *Kedua*, media berperan sebagai saluran komunikasi politik bagi dirinya sendiri. Media dapat dianggap sebagai salah satu aktor di dalam praktek komunikasi politik yang ada. Katrin Voltmer (2006) sebagaimana dikutip Marijan (2010:145) menjelaskan dua sudut pandang media dalam ranah komunikasi politik. *Pertama*, dilihat dalam perspektif argumentatif normatif. Demokrasi mensyaratkan adanya suasana kebebasan dalam berbicara dan menyampaikan pendapat sehingga terciptanya ruang debat publik yang sehat, menjadikan sistem pers juga bersifat demokratis. media menjadi "*marketplace of ideas*" yang memungkinkan berbagai macam pandangan dan suara muncul dalam debat publik tanpa mengkhawatirkan adanya tekanan dari manapun. Akan tetapi pandangan ini dikritik karena posisi media massa dianggap netral dan hanya sebagai perantara semata. Media massa hanya sebagai alat yang menjembatani segala macam fakta dan opini dalam komunikasi politik yang terjadi. Padahal, ada kalanya media massa justru berfungsi sebagai pihak yang menciptakan isu-isu tertentu dalam debat publik dalam suatu peristiwa politik.

Dalam konteks Indonesia, kebebasan pers dan kemerdekaan bereskrpsi seharusnya menjadikan media massa sebagai saluran komunikasi politik yang mendorong terciptanya kondisi demokratis dalam sistem politik. Media menjadi jembatan bagi suara-suara rakyat agar menjadi diskusi publik sehingga terkondisikan suasana egaliter dan rasional dalam proses-proses pengambilan keputusan.

d. Media Massa dan Public Sphere

Jurgen Habermas mengidamkan adanya sebuah situasi munculnya sebuah *public sphere*, dimana komunikasi dilakukan dalam wilayah sosial yang bebas dari sensor dan dominasi. Dalam esainya Habermas melihat perkembangan wilayah sosial macam itu dalam sejarah masyarakat modern. Wilayah itu disebutnya "dunia publik" (*public sphere*). Semua wilayah kehidupan sosial kita yang memungkinkan kita untuk membentuk opini publik dapat disebut dunia publik. Semua warga masyarakat pada prinsipnya boleh memasuki dunia macam itu (Hardiman, 1993). Status-status individual seperti politikus, ekonom, dan semacamnya ditanggalkan karena bukan soal-soal pribadi mereka yang dipercakapkan, melainkan soal-soal kepentingan umum yang dibicarakan tanpa paksaan, sebab mereka memiliki jaminan berkumpul dan berserikat secara bebas dan menyatakan opini-opini mereka secara bebas. Salah satu medium yang diharapkan mampu berperan sebagai *public sphere* dalam tatanan kehidupan masyarakat modern, yaitu media massa yang perannya sebagai sebuah ruang publik yang mampu menjembatani suara dan opini masyarakat menjadi ruang diskusi yang terbuka. Media seharusnya

berperan sebagai ruang publik, sehingga dapat menjadi sarana diskusi bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi politiknya.

Berita konflik dipublikasikan melalui media massa untuk menciptakan kesadaran publik. Masyarakat dihadapkan kepada suatu fenomena yang riil di dalam kehidupan politik, kemudian mengkritisi fenomena tersebut. Ketika media massa banyak memberitakan maraknya konflik horizontal dan konflik politik di dalam masyarakat, maka pada saat yang sama berperan menciptakan daya kritis. Menurut Jonathan Woodier (2009) jika melihat sejarahnya, media komunikasi massa di Indonesia selama ini lebih banyak digunakan oleh pemerintah sebagai instrumen kepentingan politis. Fenomena yang umum terjadi di kawasan Asia Tenggara (dalam Andrews, 2008). Dan baru belakangan ini saja media massa mulai dianggap sebagai public sphere, menurut Millner (1995) sebagai *'providing the space in which social identity or political policy might be debated'* (Hamad, I. (2004). Ketika media massa telah menjalankan fungsi agenda-setting, terutama dalam memfungsikan dirinya sebagai *public sphere*, maka kemungkinan suara masyarakat tersalurkan melalui media akan lebih dimungkinkan. Media untuk itu lebih berpihak kepada menyampaikan kepentingan dan aspirasi masyarakat dibandingkan sekedar menyalurkan kepentingan bisnis pemilik media ataupun kepentingan politik lainnya. Jika demikian, maka masyarakat akan melihat bahwa media massa dapat menjadi saluran komunikasi politik alternatif bagi mereka jika ternyata saluran komunikasi politik yang ada sudah tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya.

e. Kelemahan Media dalam Meliput Konflik

Harus diakui bahwa media massa di Indonesia memiliki kelemahan dalam liputannya. Ada yang suka memelintir berita karena memiliki konflik kepentingan, sehingga terlihat subjektif dan lebih mengedepankan *talking news* (Sirait, 2007: 220). Kelemahan lain yang sering terlihat adalah sifat reaksioner media, yaitu hanya meliput jika terjadi peristiwa. Contohnya, media hanya meliput tentang konflik Aceh jika ada penembakan atau peristiwa separatistis di sana. Ketika memberitakan soal aksi mahasiswa atau buruh, pola serupa ini dipakai. Yang diangkat hanya sebatas kelompok mana yang melakukan unjuk rasa, berapa massanya, apa tuntutan, dan apakah terjadi bentrok dengan aparat. Yang digarisbawahi dalam model reportase reaksioner semacam ini adalah aspek 5W + 1H, dengan mengabaikan latar historis konflik tersebut dan tahap resolusinya. Persoalan mendasar apa yang sebenarnya ada di balik aksi unjuk rasa itu jarang ditonjolkan media, terutama yang sajiannya berformat *straight atau hard news*. Jika kontak senjata sudah terjadi, yang diberitakannya adalah aspek *magnitude*-nya, seperti berapa yang terluka, atau bahkan tewas saat demonstrasi (Sirait, 2007: 221). Faktor pembaca atau pemirsa pun penting memiliki tingkat intelegensia dan kesadaran moral yang tinggi agar memahami secara komprehensif

sebuah berita. Dan dapat memilah-milah informasi yang kredibel.

f. Provokasi atau Solusi

Konflik menjadi sajian utama media massa di seluruh dunia karena isu ini memang menarik dan mengundang banyak *viewer* untuk memperhatikannya. Adagium *bad news is a good news* tampaknya memang sudah melekat dalam pekerjaan setiap wartawan. Karena konflik adalah termasuk salah satu berita buruk kerap terjadi di hampir penjuru dunia, maka berita-berita seperti inilah yang sering menjadi *headline* di berbagai media massa di dunia, termasuk Indonesia. Beragam isu dikemas dengan tujuan laik jual, akhirnya dituding sebagai pihak yang berkontribusi dalam eskalasi kekerasan.

Contohnya adalah liputan mengenai perang. Sejak lama perang menjadi objek liputan media massa, dan kecenderungannya adalah semakin parah perang maka unsur pemberitaannya menjadi semakin menarik di mata media. Sudah sejak lama wartawan berprinsip bahwa semakin parah perang kian seksi ia untuk diberitakan. Prinsip *bad news is a good news* tadi menjadi patokan utama. Prinsip ini cenderung provokatif daripada solutif.

Agar sajian perang menarik, berbagai cara pun dilakukan, termasuk dengan memperindah kemasan berita. Perkembangan menarik muncul sejak beberapa tahun terakhir mengedepankan sisi dramatik dan pemujaan unsur-unsur kepahlawanan menjadi sajian khas dalam liputan konflik, telah mendapat kritikan dari kalangan wartawan sendiri. Mereka menganggap pendekatan semacam itu hanya akan mengagungkan kekerasan. Media, menurut mereka, selama ini cenderung mengemas konflik sebagai komoditi karena berprinsip *bad news is good news*, sehingga selain bias juga provokatif.

Media dipandang sebagai agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas. Media merupakan wahana pergulatan antarideologi yang saling berkompetisi. Media adalah ruang di mana berbagai ideologi direpresentasikan. Representasi ideologi dapat dilihat melalui berita pada media massa. Sebab, proses pemaknaan terhadap realitas selalu melibatkan nilai-nilai yang dimiliki media massa tersebut. Untuk itu, agak sulit rasanya media bersikap solutif atau memposisikan dirinya sebagai sarana pencegah konflik. Banyaknya kepentingan-kepentingan yang bermain dan penggunaan logika bisnis, yang secara hukum tentunya sah-sah saja dilakukan karena tidak ada aturan jelas yang mengatakan bahwa media harus berusaha mencegah konflik. Yang ada hanyalah kaidah-kaidah etika, seperti menjalankan prinsip keberimbangan, imparialitas, jujur, memperhatikan sisi-sisi kemanusiaan, menghindari provokasi dengan memperhitungkan dampak pemberitaan, dan lain sebagainya yang mirip-mirip seperti itu (Sirait, 2007: 218). Tidak ada aturan dengan konsekuensi hukum yang jelas tentang bagaimana media harus melakukan sebuah liputan dan akhirnya menyajikannya.

Pemberitaan soal kekerasan akhirnya banyak yang menjadi propaganda, kendati media mengklaim menggunakan objektivitas dengan bersandar kepada standar jurnalisme tertentu. Secara ideologi, dalam sistem kapitalisme, media tidak lain adalah superstruktur yang dimiliki dan dikontrol kaum kapitalis, bergantung kepada iklan sebagai sumber utama pembiayaan, dan merupakan bagian dari sistem korporasi secara keseluruhan. Media dapat bertahan jika hukum-hukum produksi dan sirkulasi kapital secara umum tidak terganggu. Mempromosikan pasar menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari eksistensi media (Purwanto, 2012: 214).

Penulis bersumsi bahwa peran media dalam konteks memberitakan konflik sangat dibutuhkan dalam iklim demokrasi. Secara tidak langsung, media memberikan gambaran dari berbagai macam perspektif tentang sebuah objek pemberitaan yang akan memperkaya perspektif pembacanya. Pada akhirnya kembali kepada para pembaca untuk memilih berita yang mereka inginkan, mana berita yang mengandung fakta, mana yang hanya sekedar mencari sensasi, hiburan, atau oplah tinggi. Jika masyarakat kita memiliki kesadaran, maka konstruksi atas realita yang dibuat media, konflik niscaya tidak akan terjadi.

3. Penutup

Pemberitaan media massa merupakan cerminan realitas yang terlihat dari pemberitaan. Pemberitaan konflik/kekerasan merupakan refleksi pada masyarakat. Dalam konteks Indonesia, banyak pemberitaan konflik di masyarakat baik konflik horizontal maupun konflik politis sebagai akibat logis dari sistem politik yang mengalami persoalan. Memasuki fase reformasi, sistem politik dan sistem pers di Indonesia memasuki era keterbukaan, walaupun masih belum sepenuhnya menjadi sistem politik/sistem pers yang demokratis, tapi menjadi sangat lumrah terjadi pada era reformasi. Maraknya konflik/kekerasan dipahami sebagai akibat semakin berjaraknya antara elit politik dengan masyarakat. Saluran-saluran komunikasi politik tidak berjalan secara sehat. Media massa juga dikritik karena tidak melakukan fungsi agenda-setting, berita konflik tidak dijadikan komoditi media. Segala macam bentuk konflik/kekerasan dapat dihindari jika masyarakat dapat berpartisipasi dalam sistem politik. Media massa dapat berperan dalam menjembatani suara-suara masyarakat jika komunikasi media massa berjalan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, I., & Muchtadlirin (ed). (2001). *Media Dan Integrasi Sosial Jembatan Antar Umat Beragama*. Jakarta: CSRC UIN Syarif Hidayatullah.

Bell, D. (2004). Is Democracy the 'Least Bad' System for Minority Groups? Dalam Henders, S. (ed). *Democratization and Identity: Regimes and*

Ethnicity in East and Southeast Asia. New York: Lexington Book.

Colin MacAndrews, 2008, *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Dara Aisyah, 2003, *Hubungan Birokrasi Dengan Demokrasi*. Usu Digital Library

Eriyanto. (2001). *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: PT. LKiS.

------. (2003). *Media Dan Konflik Ambon*. Jakarta: KBR68H.

------. (2005). Koran, Bisnis, dan Perang. dalam Harsono, A dan Setiono, B (eds.). *Jurnalisme Sastrawi*. Jakarta: Yayasan Pantau.

Faules, F, dan Pace, W. (1994). *Organizational Communication*. Allyn and Bacon.

Habermas, J. (2001). *The Structural Transformation of the Public Sphere; An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*, Cambridge: MIT Press.

Haryanto, 1984, *Partai Politik: Suatu Tinjauan Umum*, Yogyakarta: Liberty

Hamad, I. (2004). *Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa*. Jakarta : Granit.

Hardiman, B. (1993). *Menuju Masyarakat Komunikatif*. Yogyakarta: Kanisius.

Ishwara, L. (2007). *Catatan-Catatan Jurnalisme*. Jakarta: Kompas

Johnny Ibrahim. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia Publishing

Koentjoro Poerbopranoto. 1987. *Sistem Pemerintahan Demokrasi*. Bandung: Eresco.

Kristianto, A.E., & Zen, P.M (ed). (2009). *Refleksi Keberagaman Agama: Hukum Sesat Dan Menyesatkan*. Jakarta: YLBHI.

Littlejohn & Foss. 2009. *Teori Komunikasi*. Jakarta: Salemba Humanika.

Marijan, K. (2010). *Sistem Politik Indonesia; Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Kencana

Nugroho, B., Eriyanto., & Surdiasis, F. (1999). *Politik Media Mengemas Berita*. Yogyakarta: Institut Studi Arus Informasi.

Rakhmat, Jalaludin. 2007. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Samsul Wahidin. 2011. *Hukum Pers*, Yogyakarta: Pustaka Belajar

Sirait, H. (2007). *Jurnalisme Sadar Konflik: Meliput Konflik Dengan Perspektif Damai*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen.

Siregar, A. (2006). *Etika Komunikasi*. Yogyakarta: Pustaka.

Sugeng, H. (2010). Dari Kekerasan Menuju Pemilihan: Resolusi Konflik dan Demokratisasi di Aceh. dalam Sugeng, H. dan Schuck, C. (eds.) *Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Suranto, Setiawan, Ginanjar. (1999). *Pers Indonesia Pasca Soeharto: Setelah Tekanan Penguasa*

Melemah. Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan.

Yursak, F. (2007). *Eddie Widiono: Di Bawah Pusaran Media*. Jakarta: Next Reign Media.

Nonbuku:

Dian Eka Rahmawati. Diktat Komunikasi Politik dalam Hubungan Antara Media massa, Politik, dan Demokrasi, dalam:

<http://muslimpoliticians.blogspot.com/2012/02/hubungan-antara-media-massa-politik-dan-demokrasi.html>, diunduh: 14 Maret 2014

Fungsi Media Massa dalam <http://www.winkplace.com/2010/10/fungsi-media-massa.html>, tanggal akses: 14 Maret 2014.

<http://outweigh.blogspot.com/2011/01/ketika-media-massa-berperan-dalam.html>

<http://trulyoktopurba.wordpress.com/2013/02/05/peran-media-dalam-pengelolaan-konflik-dan-pembangunan-perdamaian-dari-konflik-menuju-perdamaian-4-habis/>

<http://wsmulyana.wordpress.com/2009/01/09/teori-kultivasi/>

<http://www.himikomunib.org/2012/12/teori-ketergantungan-dependency-theory.html>

Iwan Awaluddin Yusuf dalam:

<http://bincangmedia.wordpress.com/2010/08/23/dalam-kecamuk-konflik-bagaimana-seharusnya-media-berpihak/>

Media Massa dan Demokrasi. <http://lutviah.net/2011/03/15/media-massa-dan-demokrasi/>

Rangga Sujud Widigda. *Peran Media Massa di Dalam Masyarakat*, dalam:

<http://lk2fhui.org>, tanggal akses: 14 Maret 2012

Siti Aminah, Politik Media, *Demokrasi dan Media Politik*, dalam:

<http://journal.unair.ac.id>, tanggal akses: 14 Maret 2012